



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EMI NOPISAH
NIK : 1571015201620001
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD
Jabatan : SEKRETARIS DPRD
Jenis Laporan : Periodik - 2019
Tanggal Kirim : 11 Februari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMINOPISAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 270951

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 915.650.000

1. Tanah Seluas 8655 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 259.650.000
2. Tanah Seluas 3712 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 111.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 366 m2/200 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/26 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 108 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 108.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 298.450.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.312.247.831

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.634.347.831

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.634.347.831

Rp. 8.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.